



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 7 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **WIWIK SRI UTAMI**
2. Jabatan : **DEKAN**
3. NHK : **912502**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **7.265.000.000**

1. Tanah Seluas 223 m2 di KAB / KOTA KOTA MOJOKERTO , HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
2. Tanah Seluas 108 m2 di KAB / KOTA MOJOKERTO, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 170 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 2.050.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/60 m2 di KAB / KOTA SIDOARJO, HASIL SENDIRI Rp. 1.040.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 160 m2/120 m2 di KAB / KOTA KOTA MOJOKERTO , HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
6. Tanah Seluas 187 m2 di KAB / KOTA KOTA MOJOKERTO , HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
7. Tanah Seluas 268 m2 di KAB / KOTA KEDIRI, WARISAN Rp. 200.000.000
8. Tanah Seluas 2895 m2 di KAB / KOTA KEDIRI, WARISAN Rp. 850.000.000
9. Tanah Seluas 2950 m2 di KAB / KOTA KEDIRI, HASIL SENDIRI Rp. 950.000.000
10. Tanah Seluas 3260 m2 di KAB / KOTA KEDIRI, HASIL SENDIRI Rp. 975.000.000



B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	420.000.000
1. MOBIL, HONDA CR,V 1.5 CT CVT Tahun 2018, HASIL SENDIRI		
Rp. 320.000.000		
2. MOBIL, HONDA FREED GB 1.5 AT Tahun 2012, HASIL SENDIRI		
Rp. 90.000.000		
3. MOTOR, YAMAHA 2DP NON ABS Tahun 2017, HASIL SENDIRI		
Rp. 10.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	63.750.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	1.109.372.996
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	8.858.122.996
III. HUTANG	Rp.	8.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	8.850.122.996

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.